



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

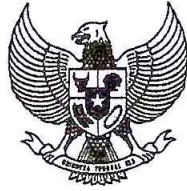
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 104 TAHUN 2026
TENTANG
PANITIA ANTARKEMENTERIAN DAN/ATAU ANTARNONKEMENTERIAN
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN
TENTANG STRATEGI NASIONAL PENGHAPUSAN KEKERASAN TERHADAP
PEREMPUAN DAN ANAK

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak telah habis masa berlakunya dan perlu pembaharuan yang komprehensif diintegrasikan dengan isu perempuan;
- b. bahwa dalam menyusun Peraturan Presiden sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu membentuk Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

Republik ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

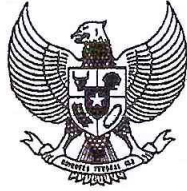
- Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
 3. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 382);
 4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 132);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PANITIA ANTARKEMENTERIAN DAN/ATAU ANTARNONKEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG STRATEGI NASIONAL PENGHAPUSAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

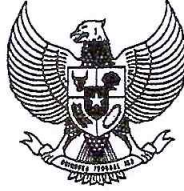
- KEDUA : Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- a. memberikan masukan terkait dengan substansi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
 - b. melakukan penyiapan, pengolahan, dan perumusan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak; dan
 - c. melaporkan perkembangan hasil kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak paling lambat 1 (satu) bulan setelah penyusunan Rancangan Peraturan Presiden ini dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KETIGA : Pendanaan yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Mei 2026

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFATUL CHOIRI FAUZI



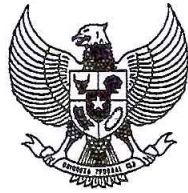
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 104 TAHUN 2026
TENTANG
PANITIA ANTARKEMENTERIAN DAN/ATAU
ANTARNONKEMENTERIAN PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN
TENTANG STRATEGI NASIONAL
PENGHAPUSAN KEKERASAN TERHADAP
PEREMPUAN DAN ANAK

SUSUNAN KEANGGOTAAN

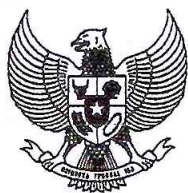
NO.	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
1.	Pengarah	1. Arifatul Choiri Fauzi	Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2. Veronica Tan	Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.	Penanggung Jawab	Ratna Susianawati	Plt. Sekretaris Kementerian, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3.	Ketua	Titi Eko Rahayu	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4.	Wakil Ketua	Muhammad Ihsan	Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Perlindungan Khusus Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.	Sekretrais	Agung Budi Santoso	Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

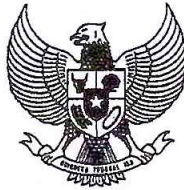
6.	Anggota	1. Margareth Robin Korwa	Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2. Dian Ekawati	Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga, Kondisi Khusus, dan Situasi Darurat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		3. Fatahillah	Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Pemenuhan Hak Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		4. Eko Novi Ariyanti Rahayu Damayanti	Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah II, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		5. Nia Reviani	Asisten Deputi Pemenuhan Hak, Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
		6. Jazziray Hartoyo	Asisten Deputi Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
		7. Syarip Hidayat	Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian Koordinator Bidang



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

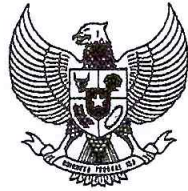
			Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
		8. Brigjen Pol Adhi Satya Perkasa	Asisten Deputi Bidang Penanganan Kejahatan Transnasional dan Luar Biasa, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
		9. Muhammad Waliyadin	Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II, Kementerian Hukum
		10. Yulanto Araya	Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya, Kementerian Hukum
		11. Reni Mursidayanti	Kepala Biro Hukum, Kementerian Ketenagakerjaan
		12. Agatha Widianawat	Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan
		13. Qurrota A'yun	Direktur Keluarga, Pengasuhan, Perempuan, dan Anak, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
		14. Ari Prasetyo	Kepala Biro Hukum, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
		15. Indra Zakariya Rayusman	Kepala Biro Hukum, Kementerian Pertanian



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

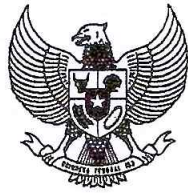
	16. Seta Rukmalasari Agustina	Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Pertanian
	17. Zuroqi Mubarok	Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian
	18. Reslyana Dwitasari	Kepala Pusat Data dan Informasi, Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
	19. Binoni Tio A. Napitupulu	Direktur Ketahanan dan Iklim Usahan Industri, Direktorat Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional, Kementerian Perindustrian
	20. Emil Satria	Sekretaris Inspektorat Jenderal, Kementerian Perindustrian
	21. Ikana Yossye Ardianingsih	Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Perindustrian
	22. Hadi Wahyunigrum	Direktur Reintegrasi dan Penguatan Keluarga, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
	23. Edwin Aldrin Purba	Kepala Biro SDM, Hukum, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian Hak Asasi Manusia
	24. Bastian	Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama, Kementerian UMKM
	25. Reza Fikri Febriansyah	Kepala Biro Organisasi, SDMA dan Hukum, Kementerian UMKM
	26. Hariyadi Wibowo	Direktur Kebijakan Strategi Bidang Penyerasian Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana, Kementerian



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

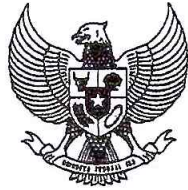
			Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN
		27. Irma Ardiana	Direktur Bina Ketahanan Keluarga Balita dan Anak, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN
		28. Imam Syaukani	Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Agama
		29. Kastolan	Kepala Biro Perencanaan dan Penganggaran, Kementerian Agama
		30. Imran Pambudi	Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan, Kementerian Kesehatan
		31. Hendrastuti Pertiwi	Sekretaris Ditjen Kesehatan Primer dan Komunitas, Kementerian Kesehatan
		32. Indah Febrianti	Plt Kepala Biro Hukum, Kementerian Kesehatan
		33. Restuardy daud	Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
		34. Teguh Setyabudi	Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri
		35. Paudah	Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV, Kementerian Dalam Negeri
		36. R.Gani Muhama	Kepala Biro Hukum, Kementerian Dalam Negeri
		37. Yustina Dwiratna	Plt. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Komunikasi dan Digital



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

	38. Safriansyah Yanwar Rosyadi	Direktur Pengendalian Ruang Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital
	39. Beny Bandanadjaja	Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
	40. Sri Suning Kusumawardani	Direktur Sumber Daya, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
	41. Andrey Ikhsan Lubis	Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal
	42. Andy Artha Donny Oktopura	Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Kelautan dan Perikanan
	43. Muhammad Ravii	Kepala Biro Hukum, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
	44. Rusprita Putri Utami	Kepala Pusat Penguatan Karakter, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
	45. Ardhien Nissa Widhawati Siswojo	Kepala Biro Hukum dan Fasilitas Kerja Sama, Kementerian Kebudayaan
	46. Siti Hafsoh Shoparina	Analisis Hukum Muda, Kementerian Kebudayaan
	47. Marlisa Reni	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama, Kementerian Kebudayaan
	48. Sigit Setyawan	Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama, Kementerian



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

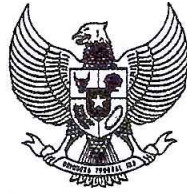
			Imigrasi dan Pemasyarakatan
		49. S. Utari Widyastuti	Sekretaris Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, Kementerian Pariwisata
		50. Reni Mursidayanti	Kepala Biro Hukum, Kementerian Ketenagakerjaan
		51. Rinaldi Umar	Direktur Bina Pemeriksaan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan
		52. F. Budi Prayitno	Kepala Biro Hukum, Kementerian Perhubungan
		53. Lina Widiyastuti	Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama, Kementerian Koperasi
		54. Eka Pan Lestari	Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Dukungan Strategis Pimpinan, Kementerian Koperasi
		55. Nurma Midayanti	Direktur Statistik Ketahanan Sosial, Badan Pusat Statistik
		56. Tri Suryaningsih	Statistisi Ahli Madya, Badan Pusat Statistik
		57. Diane Putri Prahastiwi	Statistisi Ahli Muda, Badan Pusat Statistik
		58. Didi Hamzar	Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama, Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan
		59. Brillyan Syah Nooroctav Arifin	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan
		60. Tatiek Sufahriani	Direktur Advokasi, Badan Narkotika Nasional
		61. Raden Dimas	Analisis Legislasi, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

	62. Dea Seli Vea	Ahli Pertama - Analis Kebijakan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
	63. Irma Dewi Rismayati	Kepala Biro Hukum Organisasi, dan Kerja Sama, Badan Nasional Penanggulangan Bencana
	64. Abriadi	Analisis Kebijakan Ahli Madya, Badan Keamanan Laut
	65. Edwar Sonatha	Analisis Hukum Ahli Madya, Badan Keamanan Laut
	66. Esnawan Wirayudha	Perancang PUU Ahli Pertama, Badan Keamanan Laut
	67. Imam Fath Widahrnata	Analisis Hukum, Badan Keamanan Laut
	68. Udrek	Direktur Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana
	69. Trevi Jayanti Puspasari	Penelaah Teknis Kebijakan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana
	70. Agoes Soenanto Prasetyo	Direktur C, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Kejaksaan RI
	71. Kombes Pol Sinta	Kasubdit I Dittipid PPA dan PPO Bareskrim, Kepolisian Republik Indonesia
	72. Diyah Puspitarini	Anggota KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia
	73. Putu Elvina	Wakil Ketua Bidang Eksternal, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
	74. R.R. Sri Agustini	Komisioner Komnas Perempuan, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

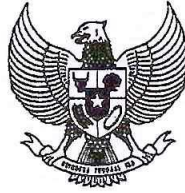
		75. Fatimah Asri Mutmainah	Anggota Komisioner, Komisi Nasional Disabilitas
		76. Indryasari	Analisis Hukum Ahli Madya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
		77. Ery Kurnia	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
		78. Muhammad Novian	Plt. Direktur Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
7.	Sekretariat	1. Dita Andriasari	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Perlindungan Khusus Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2. Rina Nursanti	Perencana Ahli Madya pada Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga, Kondisi Khusus, dan Situasi Darurat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		3. Noel Sita Rukmi	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

		4. Ramos Luther	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		5. Rina Mofu	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum dan Kerja Sama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		6. Yeyep Mulyana	Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum dan Kerja Sama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		7. Sekar Santi Nastiti	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Biro Hukum dan Kerja Sama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		8. Maria Mutia Rini	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		9. Armi Susilowati	Perencana Ahli Muda pada Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga, Kondisi Khusus, dan Situasi Darurat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

		10. Widia Karolina	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		11. Dida Rachma Wandayati	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		12. Eva Evi Tadjo	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFATUL CHOIRI FAUZI